

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023
Waktu : 10.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:
1. *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023;
2. Tindak Lanjut Kunjungan Kerja; dan
3. Isu-isu Aktual Lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan Dr. Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 32 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal);
3. Ir. Muhammad Zaini, M.M. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap);
4. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);
5. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);
6. Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);

7. Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan);
9. Ir. Teuku Nilwan, M.M. (Plt. Inspektur Jenderal);
10. Ir. Ishartini (Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);
11. Sigit Muhartono, (Direktur Utama PT Perikanan Indonesia); dan
12. Arif Haendra, Direktur Utama PT Garam (Persero).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, membahas *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023, Tindak Lanjut Kunjungan Kerja, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.15 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *Automatic Adjustment* anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, sebesar **Rp468.167.685.000,00** (empat ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, yang semula sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp6.299.489.191.000,00** (enam triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan komposisi *Automatic Adjustment* per Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp71.258.323.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp9.644.931.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp82.632.209.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

- d. **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp84.754.851.000,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp59.013.551.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp60.239.658.000,00 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp57.799.931.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - h. **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp21.331.372.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
 - i. **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp21.492.859.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar membuka alokasi anggaran yang terkena *Automatic Adjustment* Tahun 2023 di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp468.167.685.000,00** (empat ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan tersebut cepat terimplementasi dengan baik.
 4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 terutama terkait jaring hela udang berkantong, tidak lagi masuk ke Jalur II agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta bantuan Kampung Nelayan Maju (KALAJU) agar dapat segera dikeluarkan SK penetapannya terutama yang telah lulus verifikasi.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap impor ikan dan garam agar tidak merembes ke pasar yang peruntukannya untuk industri.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk memperbaiki kualitas dan ukuran benih ikan (lele dan nila) dalam paket bioflok (6 s.d. 8 cm) yang disalurkan kepada masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta dilakukan pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri untuk menekan biaya pakan konvensional yang mahal.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan laporan perusahaan-perusahaan tambang mana saja yang membuang limbah tailing ke perairan pantai dan pesisir selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Kerja hari ini.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan Paket Unit Pembenihan Rakyat (UPR) pengganti program bantuan benih ikan yang saat ini tidak maksimal.
9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi untuk pembudi daya ikan tradisional mengingat Tahun 2022 tidak terealisasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151